

KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN PANGAN DI KELURAHAN TEWAAN KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG

Oleh

Stevie M. Mangalo¹, Evi E. Masengi², Fitri H. Mamonto³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

E-mail: ¹kk.stevie.80@gmail.com, ²evimasengi@unima.ac.id, ³fitrimamonto@unima.ac.id

Article History:

Received: 01-10-2024

Revised: 25-10-2024

Accepted: 04-11-2024

Keywords:

Bantuan Pangan,
Kebijakan
Implementasi,
Pengawasan,
Koordinasi

Abstract: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kelurahan Tewa, Kecamatan Ranowulu, beserta faktor penentunya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan implementasi belum optimal. Sasaran penerima bantuan tidak tepat akibat data yang tidak akurat dan kurang diperbarui, serta pemahaman penerima terhadap kebijakan dan mekanisme program yang rendah. Penetapan penerima bantuan oleh Badan Pangan Nasional tidak mencerminkan kondisi terkini, dan mekanisme penggantian penerima melalui SPTJM kurang melibatkan masyarakat. Penyaluran bantuan pangan sering terlambat, mengurangi efektivitas program. Faktor penentu utama adalah lemahnya pengawasan akibat minimnya mekanisme dan jumlah petugas pengawas yang tidak terlatih, serta koordinasi antarorganisasi yang buruk sehingga data tidak sinkron dan peran tumpang tindih. Rekomendasi mencakup peningkatan akurasi data penerima, penguatan kapasitas SDM, transparansi dan sosialisasi program, perbaikan mekanisme penyaluran, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pengawasan yang lebih baik

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia mengatur pemenuhan kebutuhan pangan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Regulasi ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, guna mendukung hidup sehat dan produktif [1], [2], [3].

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan pangan akibat meningkatnya jumlah penduduk, kemiskinan, serta dampak buruk fenomena El Niño seperti kekeringan dan gagal panen. Hal ini memperburuk kondisi masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pangan, sehingga memerlukan intervensi pemerintah melalui program bantuan pangan [4], [5], [6].

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan program bantuan pangan berbasis Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang diatur dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022 dan dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) bekerja sama dengan Perum BULOG dan beberapa mitra logistik. Program ini bertujuan mengurangi beban masyarakat miskin, menanggulangi kerawanan pangan, menekan angka stunting, dan menjaga stabilitas harga pangan [7], [8].

Program ini telah menjangkau 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2023, yang meningkat menjadi 22 juta KPM pada 2024. Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di Kelurahan Tewaan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, bantuan telah diberikan kepada 33 KPM pada 2023 dan meningkat menjadi 65 KPM pada 2024.

Penyaluran bantuan di Kelurahan Tewaan telah sesuai dengan regulasi, tetapi terdapat kendala terkait sasaran penerima, mekanisme penetapan, dan proses penyaluran. Data penerima sering kali tidak akurat atau tidak diperbarui, sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu, banyak penerima yang tidak memahami mekanisme program.

Penetapan penerima dilakukan secara sentralisasi menggunakan DTKS dan P3KE, namun data ini tidak selalu mencerminkan kondisi aktual masyarakat. Mekanisme penggantian penerima melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kurang melibatkan tokoh masyarakat, dan transparansi daftar penerima sering kali diabaikan, memicu kesalahpahaman.

Proses penyaluran telah memenuhi persyaratan administratif, tetapi kendala seperti perubahan jadwal dan penundaan mengurangi efektivitas program. Kurangnya sosialisasi dan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Yaons serta keterbatasan jaringan internet juga menghambat pelaporan penyaluran.

Faktor utama penghambat implementasi adalah kurangnya pengawasan yang efektif, minimnya pelatihan untuk petugas pengawas, serta lemahnya koordinasi antarinstansi, yang menyebabkan data tidak sinkron dan peran antarorganisasi tumpang tindih. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan akurasi data, transparansi, sosialisasi, serta pengawasan dan koordinasi yang lebih baik [9], [10], [11].

Penelitian ini penting dilakukan karena program bantuan pangan merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin dan rawan pangan, serta mengatasi tantangan seperti kemiskinan, kerawanan pangan, stunting, dan gejolak harga pangan. Dengan menganalisis implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Tewaan, penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, seperti ketidaktepatan sasaran, mekanisme penetapan yang tidak relevan, serta kurangnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan program di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami

secara mendalam fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kelurahan Tewaan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan dinamika yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan program [12], [13].

Penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan, termasuk bagaimana kebijakan diterapkan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap masyarakat penerima. Pemahaman yang mendalam ini dicapai melalui analisis terhadap data lapangan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Metode yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan, termasuk penerima manfaat dan petugas pelaksana. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penyaluran bantuan di lapangan, sementara analisis dokumen digunakan untuk memahami kebijakan dan aturan yang mendasari program [14], [15].

Jenis penelitian ini adalah studi kasus deskriptif. Peneliti berusaha menyajikan gambaran faktual mengenai fenomena implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Tewaan, serta hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan program tersebut [16], [17].

Pendekatan studi kasus deskriptif memungkinkan peneliti untuk menguraikan secara rinci konteks dan dinamika lokal yang mungkin tidak terungkap dalam metode penelitian lain. Hal ini memberikan wawasan spesifik tentang bagaimana kebijakan yang dirancang di tingkat nasional diterapkan di tingkat komunitas [18], [19].

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan faktor keberhasilan dalam penyaluran bantuan pangan, memberikan gambaran yang holistik tentang implementasi kebijakan, dan menawarkan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini menambah pemahaman tentang implementasi kebijakan di tingkat lokal, sementara secara praktis, temuan penelitian dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki proses penyaluran bantuan pangan, memastikan kebijakan tepat sasaran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat [20], [21], [22].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran Penerima Bantuan Pangan

Sasaran penerima bantuan pangan adalah individu atau rumah tangga yang ditargetkan menerima manfaat program bantuan. Penentuan ini dilakukan untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, mengurangi beban ekonomi, dan mendukung pengentasan kemiskinan. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria karena data yang tidak akurat dan kurang diperbarui.

Ketidaktepatan sasaran bantuan pangan disebabkan oleh data penerima yang tidak valid atau tidak sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana membuat masyarakat tidak memahami tujuan dan mekanisme program, sehingga

menghambat efektivitas pelaksanaannya.

Masyarakat miskin yang menjadi sasaran program adalah mereka yang tidak memiliki tempat tinggal layak atau memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan fasilitas sanitasi. Mereka juga termasuk kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dengan pengeluaran harian yang sangat minim.

Ketepatan sasaran dalam program bantuan pangan sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dan program memberikan dampak yang maksimal [23], [24].

Komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Sosialisasi yang tepat dapat membantu masyarakat memahami tujuan program dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan [25], [26].

Program bantuan pangan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan akses pangan masyarakat miskin dan menangani masalah kemiskinan, kerawanan pangan, stunting, dan stabilitas harga pangan. Kebijakan ini dirancang untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Agar program bantuan pangan lebih efektif, diperlukan pemutakhiran data penerima secara berkala untuk memastikan ketepatan sasaran. Selain itu, intensifikasi sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme program, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal [27], [28].

Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Pangan

Mekanisme penetapan penerima bantuan pangan adalah serangkaian proses, prosedur, dan kriteria yang dirancang untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penetapan ini melibatkan penentuan kriteria, pengumpulan data, verifikasi, dan pengesahan, dengan tujuan utama menciptakan transparansi, keadilan, dan ketepatan sasaran dalam program bantuan pangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan penerima sering kali menghadapi kendala, seperti data penerima yang tidak valid atau tidak diperbarui. Masalah lainnya adalah kurangnya koordinasi antara badan pusat dengan instansi daerah, sehingga penerima yang tidak memenuhi kriteria seperti sudah mapan, pindah domisili, atau meninggal tetap terdaftar sebagai penerima.

Penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria dapat digantikan melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun, proses ini sering kali hanya melibatkan Ketua RT atau Kepala Lingkungan tanpa masukan dari tokoh masyarakat yang lebih memahami kondisi warga. Hal ini memengaruhi akurasi dalam menentukan penerima pengganti yang benar-benar layak.

Transparansi adalah elemen penting dalam penetapan penerima bantuan pangan. Sayangnya, kurangnya pengumuman daftar penerima di masyarakat menyebabkan ketidakpercayaan dan potensi konflik. Pengumuman yang terbuka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

Proses penetapan ideal dimulai dengan menetapkan kriteria penerima yang spesifik, seperti tingkat pendapatan, kondisi sosial-ekonomi, atau jumlah anggota keluarga. Selanjutnya, pendataan awal harus dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan data sesuai kondisi terkini. Verifikasi dan validasi data juga penting untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan semua pihak memahami tujuan program dan proses penetapan. Pengawasan yang melibatkan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan pihak independen juga diperlukan untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik-praktik yang merugikan [29].

Beberapa tantangan utama dalam proses penetapan penerima bantuan pangan adalah data yang tidak terbaru, potensi penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem pendataan, peningkatan kapasitas petugas, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan data penerima [30], [31].

Proses penetapan penerima bantuan pangan yang sistematis dan transparan dapat meningkatkan efektivitas program dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan belajar dari pengalaman implementasi di wilayah lain, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berdampak positif bagi masyarakat [32], [33]

Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan

Penyaluran bantuan pangan adalah serangkaian prosedur dan sistem yang bertujuan memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dengan tepat waktu, sesuai jumlah, kualitas, dan administrasi yang ditetapkan. Proses ini mencakup penyediaan beras oleh BULOG, distribusi ke tingkat kelurahan, dan penyerahan kepada penerima dengan pendampingan dokumen administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran mengalami kendala, seperti perubahan waktu distribusi menjadi dua bulan sekali, kurangnya kejelasan jadwal, dan keterlambatan pendistribusian di tingkat kelurahan. Masalah lainnya adalah kesulitan menghubungi penerima bantuan, kualitas beras yang menurun akibat penundaan, dan kendala teknis pada penggunaan aplikasi pelaporan.

Penyaluran dimulai dengan penyediaan beras oleh BULOG yang didistribusikan melalui mitra logistik ke kelurahan. Di kelurahan, bantuan diterima dengan dokumen pendukung seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Distribusi kepada penerima dilakukan dengan verifikasi identitas, dokumentasi, dan pencatatan menggunakan aplikasi digital.

Indikator keberhasilan penyaluran mencakup ketepatan jumlah, kualitas bantuan, administrasi yang akurat, dan kepuasan penerima. Namun, distribusi masih terkendala dalam hal ketepatan waktu, yang berpengaruh pada efektivitas program dan kepuasan masyarakat penerima.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan meliputi komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya seperti infrastruktur dan teknologi, serta kurangnya komitmen pelaksana dalam memastikan bantuan tepat sasaran. Struktur birokrasi yang kompleks juga menghambat kelancaran pelaksanaan program.

Untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembaruan data penerima, optimalisasi penggunaan teknologi, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah, mitra logistik, dan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk memastikan transparansi dan keadilan.

Penyaluran bantuan pangan yang efektif membutuhkan integrasi komunikasi yang baik, sumber daya memadai, pelaksana yang berkomitmen, dan struktur birokrasi yang mendukung. Dengan memperbaiki mekanisme yang ada, program ini diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif dalam mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan [34], [35].

Pengawasan

Implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan di tingkat kelurahan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawasan yang efektif, yang memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dalam program ini masih minim, tanpa prosedur yang jelas dan petugas yang memadai.

Penelitian di Kelurahan Tawaan menemukan bahwa pengawasan dalam penyaluran bantuan pangan belum berjalan optimal. Terbatasnya jumlah petugas pengawas, kurangnya pelatihan, dan ketiadaan prosedur pengawasan yang terstruktur menjadi kendala utama. Hal ini menghambat efektivitas program dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Efektivitas pengawasan ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kompetensi dan integritas sumber daya manusia (SDM), sistem pengawasan yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. SDM yang kompeten dapat mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif, sementara teknologi dan partisipasi masyarakat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Pengawasan yang baik membutuhkan prosedur yang terstruktur dan panduan yang rinci untuk memastikan setiap tahap penyaluran bantuan dipantau dengan baik. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi monitoring dan pelaporan digital, juga dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan memfasilitasi komunikasi antara pihak terkait.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, seperti melalui mekanisme pengaduan atau forum warga, berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat menjadi pengawas sosial yang memastikan bantuan diterima oleh mereka yang berhak dan meminimalkan potensi penyimpangan [36], [37], [38].

Komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, sikap positif pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung menjadi faktor pendukung dalam pengawasan. Keempat elemen ini saling berinteraksi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan pembentukan kelompok pengawas independen yang melibatkan masyarakat, pelatihan bagi petugas pengawas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring dan pelaporan. Dengan langkah ini, kebijakan penyaluran bantuan pangan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran [39], [40].

Koordinasi Antar Organisasi

Implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan di kelurahan melibatkan banyak organisasi dan instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar organisasi yang terlibat. Tanpa koordinasi yang baik, penyaluran bantuan dapat menjadi tidak tepat sasaran, tertunda, atau bahkan menimbulkan penyimpangan.

Penelitian di Kelurahan Tewaan menunjukkan tidak jelasnya tugas dan peran organisasi pelaksana, yang menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab dan konflik antar instansi. Kurangnya informasi yang disampaikan dengan baik antar organisasi juga menjadi penyebab kesalahan dalam pelaksanaan tugas, termasuk keterlambatan distribusi bantuan dan ketidaktepatan sasaran.

Tidak adanya keselarasan data antara kelurahan, dinas pangan, dan kementerian menyebabkan ketidakakuratan dalam menentukan penerima bantuan. Ketidaksesuaian data ini juga menghambat proses evaluasi kebijakan. Sulitnya akses data dari pusat semakin memperburuk kondisi, menghambat validasi dan verifikasi data di tingkat daerah.

Efektivitas koordinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kejelasan tujuan dan tanggung jawab, komunikasi yang efektif, pemanfaatan teknologi informasi, kepemimpinan yang kuat, sumber daya yang memadai, dan struktur birokrasi yang efisien. Faktor-faktor ini perlu diintegrasikan untuk menciptakan sinergi antar organisasi dalam penyaluran bantuan pangan [41].

Komunikasi yang efektif memastikan informasi penting, seperti data penerima dan jadwal distribusi, tersampaikan dengan tepat. Tanpa komunikasi yang baik, kesalahan operasional, konflik, dan keterlambatan distribusi sering terjadi. Forum komunikasi rutin dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan hambatan komunikasi antar organisasi [42], [43].

Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan koordinasi. Penggunaan aplikasi digital untuk pendataan dan pelaporan memungkinkan sinkronisasi data secara real-time dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Sistem informasi terpadu dapat mengurangi risiko tumpang tindih data antar instansi.

Kepemimpinan yang kuat membantu mengarahkan organisasi untuk bekerja sama secara sinergis. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, terutama dalam penggunaan teknologi dan pengelolaan data, menjadi kunci untuk mengatasi masalah koordinasi. Kepemimpinan yang efektif juga mampu menangani konflik antar organisasi.

Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, diperlukan pedoman operasional bersama yang jelas untuk mendefinisikan tugas dan peran masing-masing organisasi. Pengembangan sistem informasi terpadu, pelaksanaan forum komunikasi rutin, dan peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan juga menjadi langkah penting. Desentralisasi akses data juga diperlukan agar kelurahan dapat dengan mudah mengakses data dari pusat.

Koordinasi yang baik antar organisasi akan memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan langkah-langkah perbaikan yang terintegrasi, program bantuan pangan dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam mengurangi kerawanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan [44], [45].

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Tewaan telah mengacu pada peraturan yang berlaku, yakni Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala operasional yang memengaruhi efektivitas program. Sasaran penerima bantuan sering kali tidak tepat akibat data yang tidak akurat atau tidak diperbarui, serta kurangnya pemahaman penerima tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan bantuan pangan.

Mekanisme penetapan penerima bantuan yang dilakukan secara sentralisasi oleh Badan Pangan Nasional menggunakan data DTKS dan P3KE belum mencerminkan kondisi masyarakat terkini. Proses penggantian penerima bantuan melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tidak melibatkan tokoh masyarakat yang lebih memahami situasi lokal. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengumuman daftar penerima memicu kesalahpahaman dan potensi konflik di masyarakat.

Meskipun proses penyaluran bantuan telah memenuhi persyaratan administratif, jadwal penyaluran yang berubah-ubah dan penundaan distribusi mengurangi efektivitas program. Keterbatasan dalam sosialisasi penggunaan aplikasi Yaons dan kendala jaringan internet juga menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan, yang pada akhirnya menghambat akuntabilitas program.

Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perbaikan data penerima melalui pemutakhiran yang berkala dan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses validasi. Transparansi dalam pengumuman daftar penerima harus ditingkatkan untuk mencegah kesalahpahaman. Selain itu, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme penyaluran dengan jadwal yang jelas dan memastikan sosialisasi penggunaan aplikasi digital secara menyeluruh. Infrastruktur pendukung, termasuk jaringan internet, juga harus diperbaiki untuk mendukung kelancaran pelaporan dan monitoring program. Dengan langkah-langkah ini, implementasi kebijakan bantuan pangan dapat menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Gibson, N. Stacey, T. C. H. Sunderland, and D. S. Adhuri, "Coping or adapting? Experiences of food and nutrition insecurity in specialised fishing households in Komodo District, eastern Indonesia," *BMC Public Health*, vol. 21, no. 1, p. 355, Dec. 2021, doi: 10.1186/s12889-021-10248-3.
- [2] O. B. Samosir, D. S. Radjiman, and F. Aninditya, "Food consumption diversity and nutritional status among children aged 6–23 months in Indonesia: The analysis of the results of the 2018 Basic Health Research," *PLoS One*, vol. 18, no. 3, p. e0281426, Mar. 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0281426.
- [3] R. Amalia, F. R. Siregar, M. F. Alfian, and L. P. Arie Sandy, "Regulations on nutrition in Indonesia and its relation to early childhood caries," *Front. Public Heal.*, vol. 10, Sep. 2022, doi: 10.3389/fpubh.2022.984668.
- [4] A. Akbar, R. Darma, I. M. Fahmid, and A. Irawan, "Determinants of Household Food Security during the COVID-19 Pandemic in Indonesia," *Sustainability*, vol. 15, no. 5, p. 4131, Feb. 2023, doi: 10.3390/su15054131.
- [5] M. H. Montolalu, M. Ekananda, T. Dartanto, D. Widyawati, and M. Panennungi, "The

- Analysis of Trade Liberalization and Nutrition Intake for Improving Food Security across Districts in Indonesia,” *Sustainability*, vol. 14, no. 6, p. 3291, Mar. 2022, doi: 10.3390/su14063291.
- [6] F. H. Mamonto and R. Mesra, “Persepsi Mahasiswa FISH UNIMA tentang Implementasi Materi Mata Kuliah dalam Pembentukan Karakter dan di Kehidupan Sosial,” vol. 9, no. 1, pp. 382–391, 2023, doi: 10.58258/jime.v9i1.4603/http.
- [7] Z. Conrad, L. K. Johnson, L. Jahns, and J. N. Roemmich, “Food Price Elasticity by Status of Participation in Federal Food Assistance Programs: A Laboratory-Based Grocery Store Study,” *Curr. Dev. Nutr.*, vol. 3, no. 9, p. nzz096, Sep. 2019, doi: 10.1093/cdn/nzz096.
- [8] C. Gundersen, E. Waxman, and A. S. Crumbaugh, “An Examination of the Adequacy of Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) Benefit Levels: Impacts on Food Insecurity,” *Agric. Resour. Econ. Rev.*, vol. 48, no. 3, pp. 433–447, Dec. 2019, doi: 10.1017/age.2019.30.
- [9] H. Eom *et al.*, “Reducing US Cancer Burden and Disparities Through National and Targeted Food Price Policies (P04-101-19),” *Curr. Dev. Nutr.*, vol. 3, p. nzz051.P04-101-19, Jun. 2019, doi: 10.1093/cdn/nzz051.P04-101-19.
- [10] Z. Conrad, L. Johnson, L. Jahns, and J. Roemmich, “A Laboratory-based Grocery Store Study to Evaluate Food Price Elasticity by Status of Participation in Federal Food Assistance Programs (FS02-02-19),” *Curr. Dev. Nutr.*, vol. 3, p. nzz051.FS02-02-19, Jun. 2019, doi: 10.1093/cdn/nzz051.FS02-02-19.
- [11] D. Weatherspoon, S. R. Miller, J. Ngabitsinze, L. Weatherspoon, and J. Oehmke, “Stunting, food security, markets and food policy in Rwanda,” *BMC Public Health*, 2019, doi: 10.1186/s12889-019-7208-0.
- [12] S. Camaréna, “Artificial Intelligence (AI) for Sustainable Institutional Food Systems: Implementation of AI Tools for School Nutrition Program Management in the United States of America,” *Front. Sustain. Food Syst.*, vol. 6, Jun. 2022, doi: 10.3389/fsufs.2022.743810.
- [13] C. B. Hayes, M. P. O’Shea, C. Foley-Nolan, M. McCarthy, and J. M. Harrington, “Barriers and facilitators to adoption, implementation and sustainment of obesity prevention interventions in schoolchildren– a DEDIPAC case study,” *BMC Public Health*, vol. 19, no. 1, p. 198, Dec. 2019, doi: 10.1186/s12889-018-6368-7.
- [14] B. L. Aylward, K. M. Milford, K. E. Storey, C. I. J. Nykiforuk, and K. D. Raine, “Local Environment Action on Food project: impact of a community-based food environment intervention in Canada,” *Health Promot. Int.*, vol. 37, no. 2, Apr. 2022, doi: 10.1093/heapro/daab127.
- [15] M. P. Bitler and A. Seifoddini, “Health Impacts of Food Assistance: Evidence from the United States,” *Annu. Rev. Resour. Econ.*, vol. 11, no. 1, pp. 261–287, Oct. 2019, doi: 10.1146/annurev-resource-100518-093823.
- [16] L. Calancie *et al.*, “Implementing a stakeholder-driven community diffusion-informed intervention to create healthier, more equitable systems: a community case study in Greenville County, South Carolina,” *Front. Public Heal.*, vol. 11, May 2023, doi: 10.3389/fpubh.2023.1034611.
- [17] E. Carceller-Sauras and I. Theesfeld, “The Food-as-a-Commons Discourse: Analyzing

- the Journey to Policy Impact," *Int. J. Commons*, vol. 15, no. 1, p. 368, Nov. 2021, doi: 10.5334/ijc.1100.
- [18] S. M. Sundermeir *et al.*, "A Commentary on the Healthy Community Stores Case Study Project: Implications for Retailers, Policy, and Future Research," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 14, p. 8824, Jul. 2022, doi: 10.3390/ijerph19148824.
- [19] S. Taher, N. Muramatsu, A. Odoms-Young, N. Peacock, C. F. Michael, and K. S. Courtney, "An embedded multiple case study: using CFIR to map clinical food security screening constructs for the development of primary care practice guidelines," *BMC Public Health*, vol. 22, no. 1, p. 97, Dec. 2022, doi: 10.1186/s12889-021-12407-y.
- [20] M. K. Blake, "More than Just Food: Food Insecurity and Resilient Place Making through Community Self-Organising," *Sustainability*, vol. 11, no. 10, p. 2942, May 2019, doi: 10.3390/su11102942.
- [21] M. Heenan, S. Jan, K. Cullerton, and J. Shanthosh, "A political economy analysis protocol: Case study implementing nutrition and sustainability policy into government food procurement," *PLoS One*, vol. 17, no. 9, p. e0274246, Sep. 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0274246.
- [22] A. N. Bahasoan, Muhammad, and Marsudi, "Regional Autonomy and Poverty in Indonesia: A Literature Review," *East Asian J. Multidiscip. Res.*, vol. 2, no. 4, pp. 1613–1624, Apr. 2023, doi: 10.55927/eajmr.v2i4.3869.
- [23] M. Rantung, M. Kaseger, and U. N. Manado, "Dimensi Tangible Dalam Pelayanan Di Puskesmas papakelan kecamatan tondano timur," *J. Ilmu Pemerintah. Suara Khatulistiwa*, vol. VIII, no. 01, pp. 83–94, 2023, doi: <https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i1.3347>.
- [24] A. Warren, E. Frongillo, S. Alford, E. McDonald, and J. Escobar-Alegria, "Implementation Research to Understand and Target Complex Needs: A Case Study of US-based Food Assistance Programming (P10-147-19)," *Curr. Dev. Nutr.*, vol. 3, p. nzz034.P10-147-19, Jun. 2019, doi: 10.1093/cdn/nzz034.P10-147-19.
- [25] M. Stuenkel *et al.*, "Process Evaluation of a Pilot Food Insecurity Resource Navigation Program Integrated Within Pediatric Primary Care: Utilizing RE-AIM to Inform Program Scale-up," *J. Public Heal. Manag. Pract.*, vol. 30, no. 6, pp. E344–E352, Nov. 2024, doi: 10.1097/PHH.0000000000002038.
- [26] Y. Shen, S. Vosti, B. Rogers, and P. Webb, "Integrating Cost-Effectiveness into Nutrition Programming Decisions of Specialized Nutritious Foods: An Evidence-Informed Interactive Tool," *Curr. Dev. Nutr.*, vol. 4, p. nzaa053_111, Jun. 2020, doi: 10.1093/cdn/nzaa053_111.
- [27] L. G. Rosas *et al.*, "Addressing food insecurity and chronic conditions in community health centres: protocol of a quasi-experimental evaluation of Recipe4Health," *BMJ Open*, vol. 13, no. 4, p. e068585, Apr. 2023, doi: 10.1136/bmjopen-2022-068585.
- [28] N. M. Martin, D. J. Barnett, L. Poirier, S. M. Sundermeir, M. M. Reznar, and J. Gittelsohn, "Moving Food Assistance into the Digital Age: A Scoping Review," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 3, p. 1328, Jan. 2022, doi: 10.3390/ijerph19031328.
- [29] S. H. Cheng *et al.*, "A systematic map of evidence on the contribution of forests to poverty alleviation," *Environ. Evid.*, vol. 8, no. 1, p. 3, Jan. 2019, doi: 10.1186/s13750-019-0148-4.

- [30] E. Yörük, M. F. Kina, and A. Bargu, "Political Determinants of Social Assistance Policies: A Critical Global Comparative Systematic Literature Review," *J. Comp. Policy Anal. Res. Pract.*, vol. 25, no. 2, pp. 121–155, Mar. 2023, doi: 10.1080/13876988.2022.2098721.
- [31] F. Galli, A. Cavicchi, and G. Brunori, "Food waste reduction and food poverty alleviation: a system dynamics conceptual model," *Agric. Human Values*, vol. 36, no. 2, pp. 289–300, Jun. 2019, doi: 10.1007/s10460-019-09919-0.
- [32] Y. Guo, Y. Zhou, and Y. Liu, "Targeted poverty alleviation and its practices in rural China: A case study of Fuping county, Hebei Province," *J. Rural Stud.*, vol. 93, pp. 430–440, Jul. 2022, doi: 10.1016/j.jrurstud.2019.01.007.
- [33] F. Mohammadi-Nasrabadi *et al.*, "Economic Sanctions Affecting Household Food and Nutrition Security and Policies to Cope With Them: A Systematic Review," *Int. J. Heal. Policy Manag.*, vol. 12, p. 7362, Aug. 2023, doi: 10.34172/ijhpm.2023.7362.
- [34] T. Boelsen-Robinson, A. Peeters, A.-M. Thow, and C. Hawkes, "Barriers and facilitators to implementing a healthier food outlet initiative: perspectives from local governments," *Public Health Nutr.*, vol. 24, no. 9, pp. 2758–2770, Jun. 2021, doi: 10.1017/S1368980020002323.
- [35] G. J. Fung, L. K. Jefferies, M. A. L. Call, D. L. Eggett, and R. Richards, "Comparison of Emergency Preparedness Practices between Food Assistance Program Participants and Non-Participants in the United States," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 18, no. 24, p. 12937, Dec. 2021, doi: 10.3390/ijerph182412937.
- [36] S. Menon and K. Jain, "Blockchain Technology for Transparency in Agri-Food Supply Chain: Use Cases, Limitations, and Future Directions," *IEEE Trans. Eng. Manag.*, vol. 71, pp. 106–120, 2024, doi: 10.1109/TEM.2021.3110903.
- [37] A. Chandan, M. John, and V. Potdar, "Achieving UN SDGs in Food Supply Chain Using Blockchain Technology," *Sustainability*, vol. 15, no. 3, p. 2109, Jan. 2023, doi: 10.3390/su15032109.
- [38] R. M. Ellahi, L. C. Wood, and A. E.-D. A. Bekhit, "Blockchain-Based Frameworks for Food Traceability: A Systematic Review," *Foods*, vol. 12, no. 16, p. 3026, Aug. 2023, doi: 10.3390/foods12163026.
- [39] J. Astill *et al.*, "Transparency in food supply chains: A review of enabling technology solutions," *Trends Food Sci. Technol.*, vol. 91, pp. 240–247, Sep. 2019, doi: 10.1016/j.tifs.2019.07.024.
- [40] H. Feng, X. Wang, Y. Duan, J. Zhang, and X. Zhang, "Applying blockchain technology to improve agri-food traceability: A review of development methods, benefits and challenges," *J. Clean. Prod.*, vol. 260, p. 121031, Jul. 2020, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121031.
- [41] S. N. Bleich *et al.*, "Strengthening the Public Health Impacts of the Supplemental Nutrition Assistance Program Through Policy," *Annu. Rev. Public Health*, vol. 41, no. 1, pp. 453–480, Apr. 2020, doi: 10.1146/annurev-publhealth-040119-094143.
- [42] S. Edge and S. B. Meyer, "Pursuing dignified food security through novel collaborative governance initiatives: Perceived benefits, tensions and lessons learned," *Soc. Sci. Med.*, vol. 232, pp. 77–85, Jul. 2019, doi: 10.1016/j.socscimed.2019.04.038.
- [43] D. Imami, V. Valentinov, and E. Skreli, "Food Safety and Value Chain Coordination in the Context of a Transition Economy: The Role of Agricultural Cooperatives," *Int. J.*

Commons, vol. 15, no. 1, pp. 21–34, Apr. 2021, doi: 10.5334/ijc.1039.

- [44] A. Santilli *et al.*, “Coalition Building and Food Insecurity: How an Equity and Justice Framework Guided a Viable Food Assistance Network,” *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 18, p. 11666, Sep. 2022, doi: 10.3390/ijerph191811666.
- [45] J. Cantor, R. Beckman, R. L. Collins, M. G. Dastidar, A. S. Richardson, and T. Dubowitz, “SNAP Participants Improved Food Security And Diet After A Full-Service Supermarket Opened In An Urban Food Desert,” *Health Aff.*, vol. 39, no. 8, pp. 1386–1394, Aug. 2020, doi: 10.1377/hlthaff.2019.01309.